

## EKSPLORASI PARIWISATA PEDESAAN DI HUTAN DESA MERABU, BERAU (INDONESIA)

Juliansyah Roy<sup>1</sup>, Michael Hadjaat<sup>1</sup>, Dio Caisar Darma<sup>2</sup>,  
Saida Zainurossalamia ZA<sup>1</sup>, Jati Kasuma<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda, Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universiti Teknologi MARA Cawangan, Samarahan, Malaysia

---

### Informasi Artikel

Dikirim: 31 Maret 2021  
Diterima: 28 Juni 2021

---

### Korespondensi pada penulis :

Telepon:  
085247160010  
Email:  
[diocaisar@stiesam.ac.id](mailto:diocaisar@stiesam.ac.id)

### Abstract

*Tourism has adapted rapidly in various worlds, including Indonesia, and created significant harmonization for economic, social, and cultural uses. Since the change in the village's status forest (HD) in 2014, we hope it will become an opportunity for Merabu Village to increase the productivity of agriculture, livestock, and tourist destinations. The focus of this study is to explore the tourism potential of Merabu Village. We got data sets through interviews, FGDs, and field observations of several informants who predominantly work as farmers. The trend of tourist visits every year is also increasing, and especially rural tourism managed by Kerima Puri. Since the beginning of the presence of domestic tourists and foreign tourists, there have been tour boat services that took them to the gate of Nya'deng Lake, homestays, food providers, and various traditional attractions (cultural festivals). As a rural tourism area, HD has a positive impact on local residents to be involved in rural tourism development. This finding also hopes for a real contribution from relevant parties to advance the rural tourism of Merabu Village.*

---

**Keywords:** Interview; Local Welfare; Tourism Development; Synergy; Participation

---

### PENDAHULUAN

Hubungan antara penduduk dan pariwisata tidak terlepas dari ketergantungan manusia terhadap alam dan telah dikaitkan satu sama lain (Tanguay *et al.*, 2013; Saarinen, 2006). Berabad-abad yang lalu, manusia menjadikan aktivitas pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari, dan pariwisata tidak dapat berjalan tanpa aktivitas orang yang berkunjung, misalnya mereka yang berwisata ke objek tertentu (Connell *et al.*, 2009; Junaid *et al.*, 2020; Lincu, 2019).

Dalam perkembangannya, Indonesia mulai dikenal sebagai daerah dengan potensi wisata yang sangat beragam. Destinasi wisata di Indonesia tidak terlepas dari dukungan promosi untuk semua jenis pariwisata seperti wisata budaya, wisata religi, wisata adat, wisata alam, wisata buatan, dan wisata bahari), sehingga menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati keindahan ini. (Ratnasari *et al.*, 2020). Memang selama ini objek wisata yang paling terkenal di Indonesia adalah Bali yang memiliki pantai-pantai indah, namun juga terdapat beberapa potensi wisata di luar daerah.

Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang memiliki potensi wisata yang tersembunyi dan jarang diketahui oleh masyarakat luas (Darma *et al.*, 2020). Sejak tahun 2000-an Kabupaten Berau yang merupakan bagian dari Kalimantan Timur menjadi sorotan media, terutama eko-wisata di

destinasi bahari (seperti Pulau Kaniungan, Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan beberapa lokasi lainnya). Namun masih di kawasan serupa, Berau juga memiliki alam yang cukup eksotis dan letaknya yang terpencil. Beberapa desa seperti Merabu juga tidak kalah menarik karena dibangun oleh penduduk lokal dan perusahaan asing, selaras untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut. Selain itu, ekowisata yang terkenal dari Kalimantan Timur adalah wisata pra-sejarah, dimana ada Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Secara eksplisit, wisata terkenal ini memiliki daya tarik tersendiri yang ditawarkan kepada para pengunjung (Pulungan, 2013).

Awalnya, Desa Merabu berkembang setelah adanya perbaikan aksesibilitas seperti jalan, perkantoran, permukiman, dan puskesmas. Sekitar tahun 1990-an, saat itu tidak ada campur tangan pemerintah secara langsung untuk membangun Desa Merabu. Migrasi dari masyarakat lokal (suku Dayak Lebo) di sekitar wilayah perbatasan (Kabupaten Kutai Timur), mulai bermigrasi dan menetap di Desa Merabu. Kemudian, desa tersebut dilirik oleh *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) dari India dan *The Nature Conservancy* (TNC) oleh AS untuk dijadikan hutan konservasi. Kawasan yang sebagian besar berupa hutan dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memprioritaskan perbaikan dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Setelah itu barulah pemerintah mencoba dan berperan dalam memberikan status Desa Merabu sebagai Hutan Desa (HD) dengan tujuan untuk mensinergikan tujuan pembangunan berkelanjutan menuju pemberdayaan desa (Roy *et al.*, 2019). Alasan logis mengapa studi menarik untuk menyoroti kemampuan Desa Merabu dalam mengelola pariwisata, karena area ini tergolong sebagai desa tertinggal dan sejauh ini belum menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Berau. Melansir dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Berau (2021), situasi di Kecamatan Kelay, khususnya Desa Merabu saat ini masih memprihatinkan. Untuk itu, guna mendongkrak perekonomian masyarakat kampung, perlu mendesain program-program yang berkaitan terhadap potensi yang dimiliki.

Pemahaman yang lebih detail sejauh mana Pemerintah Kabupaten Berau telah melaksanakan program-program untuk mencapai pariwisata yang berdaya saing sebenarnya telah mengedepankan prinsip-prinsip yang diatur dalam industri pariwisata (Suharto *et al.*, 2019; Mujino, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang HD yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan kehutanan, direspon dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya pendirian HD Merabu yang berlokasi di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Setelahnya, HD juga disahkan oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penerbitan hak pengelolaan HD. Dengan tutupan hutan yang luas, Desa Merabu tidak hanya merupakan hutan produksi tetapi juga beroperasi sebagai hutan produksi dengan luas kurang lebih dan hutan lindung (Humas Provinsi Kalimantan Timur, 2015). Berbagai upaya dan prinsip mendasar untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan keasrian hutan Desa Merabu melalui program-program seperti pengendalian kebakaran lahan dan kebun, pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) untuk koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay, kampung iklim, program Karbon Hutan Berau (PKHB), penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pengembangan perkebunan berkelanjutan, percepatan pelaksanaan dan pencapaian target perhutanan sosial, dan pengembangan kemitraan di kawasan Delta Mahakam (Wahyuni *et al.*, 2018).

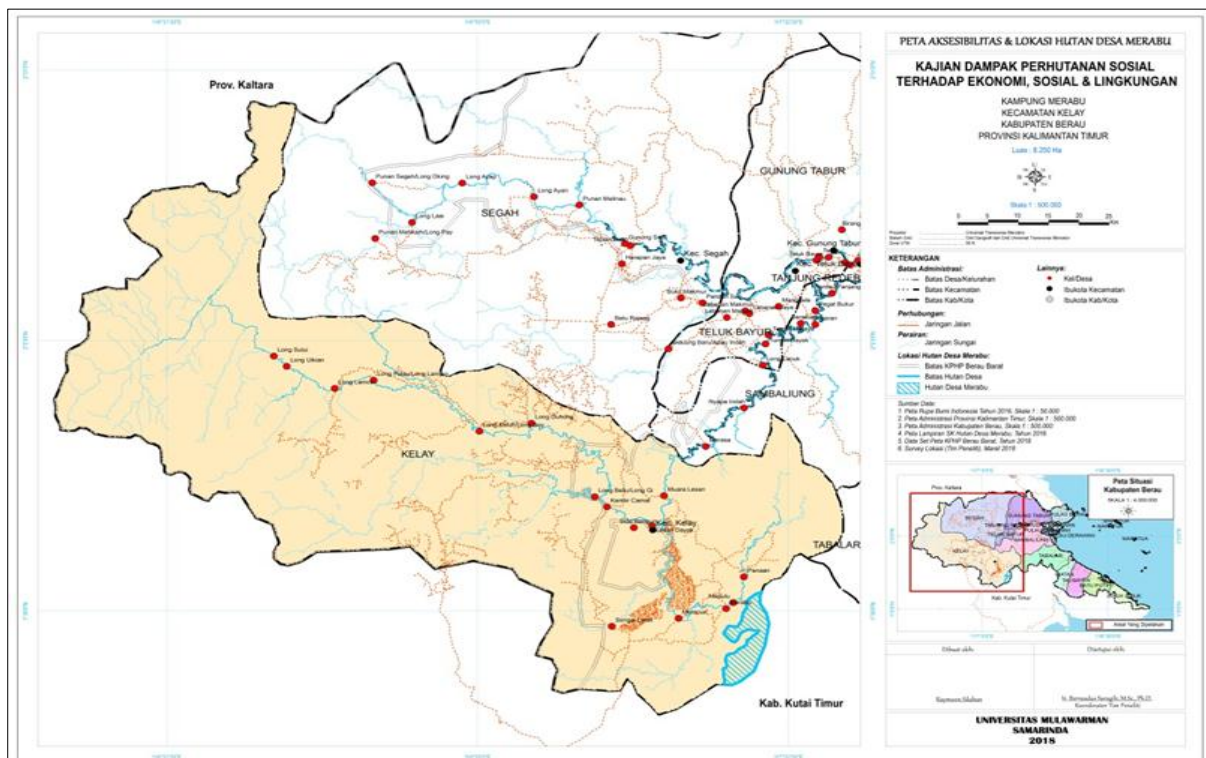
Sejalan dengan regulasi tersebut, Oley (2020) menginformasikan bahwa luas HD di Desa Merabu seluas 8.245 hektar dan saat ini dikelola melalui pemanfaatan jasa lingkungan untuk desa wisata dan pemanfaatan sumber air bersih bagi warga sekitar.

## **OBJEKTIVITAS DAN TUJUAN**

Penelitian ini berfokus pada peninjauan perkembangan ekowisata di HD Merabu yang membutuhkan pendataan primer. Pada sesi pertama, realitas latar belakang dan fenomena telah dijelaskan. Pada sesi kedua, kami berkonsentrasi pada objektivitas kajian, sehingga gambaran geografi, administrasi, karakteristik demografi, sejarah, budaya, klimatologi, dan struktur pemerintahan yang jelas akan tergambar. Untuk sesi ketiga, pencapaian belajar membutuhkan pendekatan atau materi dalam batasan metode. Pada sesi keempat, kami mencoba mendeskripsikan secara deskriptif temuan di lapangan dan membahasnya secara mendalam. Pada sesi kelima, penegasan terakhir melalui kesimpulan, batasan studi, dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Secara geografis Desa Merabu terletak pada kuadran 117012 'dan 11702 "Bujur Timur, 1019'12" dan 1038'24 "Lintang Selatan yang berada di tengah-tengah Kabupaten Berau. Terletak di sekitar Pegunungan Karst Sangkulirang Mangkalihat, berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Jarak dari Desa Merabu ke pusat kota (Tanjung Redeb) sekitar 74 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam - 4,5 jam melalui jalan darat menggunakan mobil atau motor (Badan Pusat Statistik Berau, 2019).

Secara administratif Desa Merabu berbatasan langsung dengan Desa Panaan dan merupakan bagian dari wilayah Desa Muara Lesan di posisi utara Kabupaten Kutai Timur. Batas wilayah tersebut masih sebatas batas indikatif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau tahun 2016-2036. Luas wilayah Desa Merabu adalah 22.000 ha (lihat Gambar 1). Desa ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26.30°C, dengan curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Menurut Koppen dan Geiger (1967), Desa Merabu beriklim basah. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.169 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan November sebesar 241 mm dan terendah di bulan Februari 152 mm.

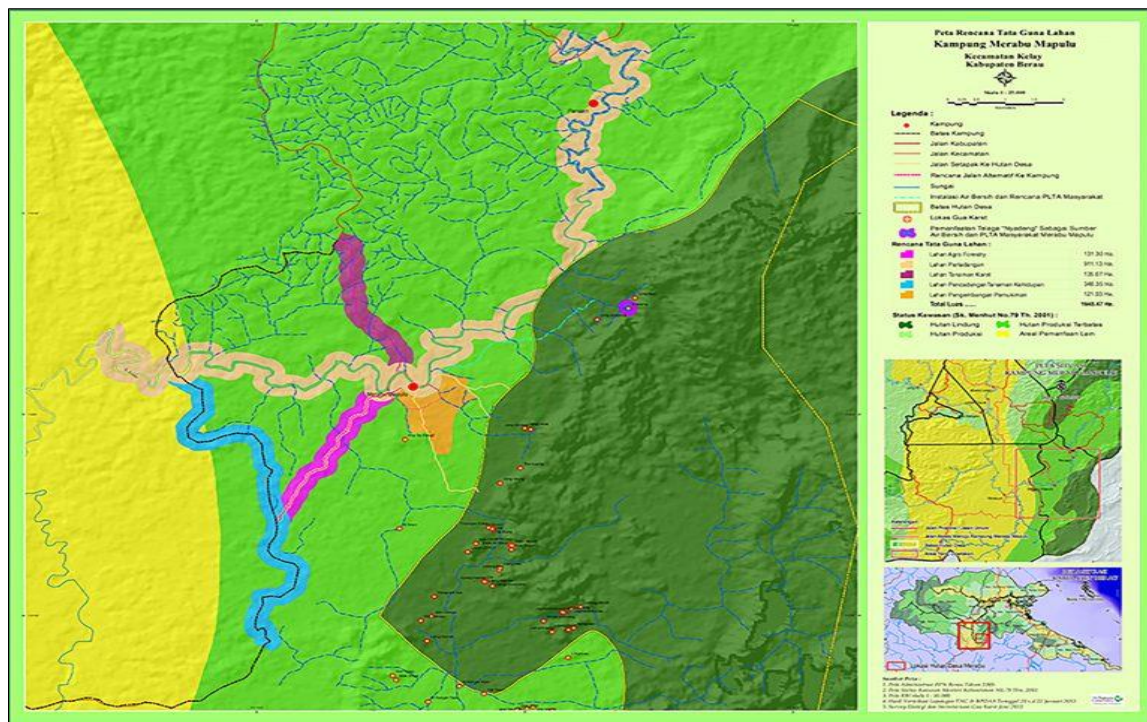


**Gambar 1.** Peta Aksesibilitas HD Merabu  
 Sumber: Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau Barat, 2019

Saat ini label HD di Kalimantan Timur terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, untuk wilayah kerja Kabupaten Berau ada satu HD yaitu Desa Merabu. Kedua, wilayah kerja Kabupaten Kutai Barat dibagi menjadi tiga desa (Desa Bermai, Desa Besiq, dan Desa Sembuan). Ketiga, untuk wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur terdapat dua desa yaitu Desa Karang dan Desa Long Form. Kelima desa tersebut juga akan segera disahkan, seperti HD Merabu, agar pemanfaatannya tidak melebihi batas (Roy et al., 2019).

Desa Merabu memiliki beberapa fasilitas dan fasilitas umum seperti sekolah dasar, rumah ibadah, dan lapangan sepak bola, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun oleh PT Akuo Energy Indonesia pada bulan April 2018 dan diresmikan oleh Wakil Bupati Berau. PLTS ini memiliki kapasitas masing-masing rumah tangga sebesar 900 watt. Dari segi jaringan telekomunikasi, Desa Merabu masih terisolir karena belum ada menara telekomunikasi yang belum bisa menjangkau jaringan telepon seluler. Namun, telekomunikasi dapat menggunakan jalur telepon dan internet satelit yang terbatas yang dipusatkan di kantor kepala desa. Sarana transportasi yang tersedia antara lain beberapa mobil pribadi dan perahu kecil bermesin tempel sebagai alat transportasi menuju desa terdekat atau ke sawah. Jumlah penduduk Desa Merabu sampai Agustus 2017 adalah 231 jiwa yang

terdiri dari 106 perempuan dan 123 laki-laki yang tinggal di Rukun Tetangga (RT) 1 dan RT 2. Rata-rata tingkat pendidikan adalah sekolah dasar dengan pekerjaan utama sebagai petani, buruh, dan karyawan swasta.



**Gambar 2.** Peta Penggunaan Lahan  
Sumber: Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau Barat, 2019

Infrastruktur jalan yang tersedia dari Ibu Kota Kabupaten menuju Desa Merabu hanya sampai ke Desa Merapun. Ironisnya, dari Desa Merapun menuju Desa Merabu yang berjarak sekitar 18,5 Km masih berupa tanah tanpa pengerasan, maka sangat sulit dilalui kendaraan saat musim hujan (lihat Gambar 2).

Dilihat dari segi sejarahnya, Desa Merabu memiliki cerita yang digali dari para sesepuh dan masyarakat lokalnya merupakan masyarakat yang berasal dari suku Dayak, tepatnya suku Dayak Lebo. Kata 'Dayak Lebo' sendiri berasal dari bahasa 'Leppo' atau 'Lepau' yang artinya gubuk atau rumah, sehingga dapat diartikan sebagai Rumah Dayak yang berasal dari pengertian bahwa setiap orang yang meninggal akan dimasukkan ke dalam peti atau ditampung.

Kata 'Merabu' berasal dari kata 'Menanga Bu' yang artinya 'Muara Sungai Bu', dimana pemukiman masyarakat berada tepat di muara sungai (sekarang sudah di daerah hilir). Nenek moyang orang Merabu dulu memiliki budaya tinggal di gua-gua di hulu sungai. Pemukiman paling terkenal adalah Gunung Kulat yang berbatasan dengan hulu Sungai Bengalon di perbatasan Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Masyarakat awalnya bermukim di Gunung Kulat dan pindah menyebar ke tengah Sungai Lesan, yang merupakan sungai di antara Tukan Canong. Desa Tukang Canong didirikan atas prakarsa seorang pemimpin yang bernama Liban di tahun 1911. Pada tahun 1915, terjadi perpecahan yang mengakibatkan sebagian penduduk pergi ke hulu Sungai Lesan, sebagian lagi ke hilir Sungai Lesan, dan sisanya masih bertahan di Desa Tukang Canong. Setelah kejadian tersebut, Desa Tukang Canong berpindah ke hilir dan kemudian berganti nama menjadi Desa Merabu.

Masyarakat Desa Merabu masih melaksanakan berbagai ritual warisan budaya sebagai bagian dari masyarakat Dayak, seperti upacara 'Tuaq Manuk', upacara adat untuk menyampaikan rasa syukur atas hasil hutan, pertanian, dan ketentraman masyarakat. Dalam hubungan sosial, masyarakat di Desa Merabu tergolong sangat rukun dan memiliki toleransi yang tinggi. Hal ini terlihat dari koeksistensi dua agama besar di desa tersebut, yaitu Kristen dengan 126 jiwa dan Islam 102 jiwa.

Cakupan di struktur pemerintahan, Desa Merabu memiliki seorang Kepala Desa kemudian seorang sekretaris dan 3 kepala urusan, dan 2 ketua RT. Hal tersebut didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **METODE DAN PROSEDUR**

Alur dan pengukuran yang tepat diharapkan mampu mengelaborasi dan mempermudah proses penggalian informasi selama penelitian. Waktu yang ditentukan dalam penyelidikan pengambilan sampel dan identifikasi pencarian objek penelitian adalah dua bulan sejak April 2019 hingga Mei 2019. Beberapa referensi yang relevan dengan fokus penelitian terbagi dalam beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menentukan pendekatan. Model penelitian dirancang secara kualitatif melalui eksplorasi deskripsi suatu objek tertentu dan cenderung pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Palmer dan Bolderston, 2006).

### **Lokasi**

Pergeseran paradigma pengelolaan hutan menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan ditujukan bagi seluruh masyarakat sipil termasuk penerima hak, dan masyarakat sekitar hutan. Keberhasilan pengelolaan hutan desa dapat dilihat dari kondisi dan permasalahan sosial ekonomi (Darma *et al.*, 2020). Oleh karena itu, studi ini mengelaborasi dampak peningkatan kesejahteraan HD melalui pengembangan eko-wisata pada masyarakat di sekitar hutan.



**Gambar 3. Jangkauan Studi**

Sumber: Survei Penulis, 2019

Kedua, cakupan studi hanya di wilayah Desa Merabu. Identifikasi dampak sosial dan ekonomi sejak keberadaan HD mendukung eko-wisata. Artinya lokasi studi hanya terkonsentrasi pada satu titik. Lokasi spesifik survei dilakukan di Desa Merabu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Indonesia). Sebagai informasi tambahan, Gambar 3 menggambarkan bentuk observasi yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pelaku ekonomi lainnya di HD Merabu.

### **Sampel dan Ukuran Data**

Unit informan adalah masyarakat sipil yang hadir di Desa Merabu. Kelompok analisis yang diwawancarai terdiri dari kelompok Desa Merabu, khususnya yang diwakili sebagai kepala keluarga. Teknik penentuan informan melalui *purposive sampling*. Metode ini adalah *purposive sampling*

berdasarkan kebutuhan sampel yang dibutuhkan terkait dengan karakteristik, sifat, dan kriteria (misalnya Kasuma *et al.*, 2020; Ilmi *et al.*, 2020; Wahyuningsih *et al.*, 2020).

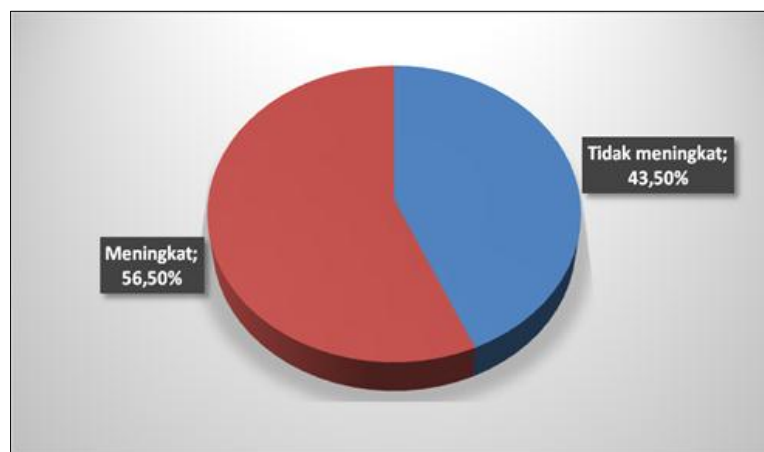
Melalui melibatkan kelompok HD, jumlah informan yang dipertimbangkan adalah 53 Kepala Rumah Tangga (KRT). Untuk mempertajam analisis dan menambah wawasan, kami juga melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan narasumber lain yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), unit usaha dari HD, dan pemangku kepentingan terkait dari pemerintah (Bupati, Dinas Kehutanan, Camat, Pemerintah Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat). FGD diharapkan mendapat masukan dari hasil survei kepada informan. Besaran informan ini juga mencakup seluruh populasi, elemen, dan pihak-pihak yang berkaitan teknis dengan pengelolaan Desa Merabu.

### Teknik Analisis

Tahap pertama melalui validasi data dilakukan dengan memilah data dari catatan lapangan dan menentukan data mana yang dapat ditransformasikan, sehingga valid. Data yang ditentukan akan dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan fokus kajian. Setelah data divalidasi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data tersebut disusun dan disusun berdasarkan pola hubungan yang ada sehingga mudah untuk dipahami (Ikhtiangung dan Utami, 2020). Selain analisis deskriptif analitik, penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menampilkan peta tematik berdasarkan tutupan lahan dan aksesibilitas Desa Merabu. Terakhir adalah menarik kesimpulan. Upaya untuk menarik ringkasan studi didasarkan pada bukti dan data yang valid, sehingga bagian ini menarik beberapa kesimpulan yang kredibel.

### HASIL DAN DISKUSI

Umumnya, informan yang berprofesi sebagai petani mengalami peningkatan pendapatan setelah HD Merabu diperkenalkan. Jenis tanaman yang menjadi sumber pendapatan petani antara lain tanaman pangan berupa padi sawah, palawija, dan hasil samping seperti hortikultura (jagung, luffa, dan kacang-kacangan), perkebunan karet, dan ternak (sapi, ayam, kambing, dan itik) yang secara dominan disumbangkan oleh TFCA dan TNC.



**Gambar 4.** Perubahan Pasca Produksi ke Status HD

Sumber: Survei Penulis, 2019

Gambar 4 menunjukkan bahwa HD sebenarnya berdampak pada peningkatan produksi. Sebanyak 51% atau 27 informan menyatakan bahwa produksi tanaman mereka meningkat setelah mendapat izin pengelolaan HD. Peningkatan ini terjadi karena mereka lebih bersemangat untuk mengolah lahannya. Di satu sisi, 26 informan atau 49% menyatakan tidak ada peningkatan produksi berstatus HD. Dengan demikian, pada masa lalu lahan hutan yang homogen, kini dengan HD bidang pertanian, perkebunan, budidaya ternak, dan pengembangan destinasi wisata menjadi sumber pendapatan utama.

Ada fakta menarik di lapangan yang membuktikan bahwa khusus bagi petani padi sawah bersifat musiman dan hanya dijadikan sebagai tradisi (adat) saja. Hal ini dikarenakan sifat tanaman

padi sawah dari setiap persil yang diperoleh petani sekitar 2-3 hektar tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan utama karena tidak beralih ke benih, pupuk, dan alat bantu (teknologi canggih) untuk bekerja. pada jenis tanaman ini, melainkan menggunakannya. konsumsi rumah tangga, dan waktu panen sekali setahun. Begitu pula dengan jenis ternak (ayam, sapi, dan itik) yang sebagian besar diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk acara adat Dayak setiap bulan April, sehingga perlu kerja ekstra di lapangan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai informan.

Peningkatan produksi petani akan berdampak pada pendapatan yang diterima. Hal ini tentunya bergantung pada fluktuasi harga komoditas yang diproduksi dan dijual ke pasar, peralatan atau teknologi yang digunakan sebagai input produksi, transportasi, akses infrastruktur, dan kebutuhan sumber daya manusia yang sangat memahami pertanian. Peningkatan produksi HD petani ternyata berdampak positif bagi peningkatan pendapatan petani.

**Tabel 1. Distribusi Pendapatan Informan**

Kelas	Interval pendapatan (Rp ribu)	Informan	Persentase
1	≤ 1.000	14	26,42
2	1.100 – 4.000	20	37,74
3	4.100 – 7.000	3	5,66
4	7.100 – 10.000	3	5,66
5	10.100 – 13.000	0	0,00
6	13.100 – 16.000	4	7,55
7	16.100 – 19.000	2	3,77
8	≥ 19.000	7	13,21
<b>Total</b>		53	100,00

Sumber: Survei Penulis, 2019

Dari 53 informan tersebut, terdapat 20 informan (37,74%) yang berpenghasilan antara Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 4 juta (37,64%), dan diikuti oleh 14 informan atau 26,42% yang berpenghasilan dari tanaman utama dan sampingan. dan ternak kurang dari Rp 1 juta. Tabel 1 juga menyajikan sebanyak 7 informan yang berpenghasilan lebih dari Rp 9 juta atau 13,21% dan tidak ada satupun yang berpenghasilan antara Rp 10,1 juta - Rp 13 juta. Interval pendapatan yang cenderung bervariasi membuktikan masih adanya kesenjangan pendapatan yang cukup lebar dari informan.

Pendapatan petani kelompok HD berasal dari tiga sumber usahatani, yaitu palawija, palawija, dan budidaya ternak. Secara garis besar proporsi pendapatan informan dari rata-rata Rp 16.212 juta, jenis tanaman utama merupakan sumber pendapatan terbesar yaitu 76,37% atau Rp 12.381.830, kemudian tanaman sampingan sekitar 16,61% atau Rp 2.692.736 dan sisanya adalah 7,02% atau Rp 1.137.708 berasal dari budidaya ternak.

**Tabel 2. Proporsi Pendapatan Informan berdasarkan Sumber**

Kelas	Interval pendapatan (Rp ribu)	Utama		Bisnis sampingan		Ternak	
		N	%	N	%	N	%
1	≤ 1.000	15	28,30	38	71,70	42	79,25
2	1.100 – 4.000	16	30,19	8	15,09	6	11,32
3	4.100 – 7.000	5	9,43	3	5,66	2	3,77
4	7.100 – 10.000	2	3,77	1	1,89	2	3,77
5	10.100 – 13.000	0	0,00	0	0,00	1	1,89
6	13.100 – 16.000	5	9,43	1	1,89	0	0,00
7	16.100 – 19.000	2	3,77	0	0,00	0	0,00
8	≥ 19.000	8	15,09	2	3,77	0	0,00
<b>Total</b>		53	100,00	53	100,00	53	100,00

Sumber: Survei Penulis, 2019

Tabel 2 juga mengevaluasi bahwa pendapatan dari jenis tanaman utama sebagian besar ditempati oleh mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata yaitu tidak lebih dari Rp1 juta atau 15 informan (28,30%). Menariknya, untuk selang waktu Rp 1,1 juta - Rp 4 juta sebanyak 16 informan

atau 30,19% dan pada garis pendapatan Rp 10,1 juta - Rp 13 juta tidak ada. Serupa dengan jenis tanaman sampingan, beberapa informan yang berpenghasilan di bawah rata-rata atau kurang dari Rp 1 juta sebanyak 38 informan atau (71,7%) dan khusus untuk budidaya ternak, 42 informan atau 79,25% berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Secara garis besar, sebagian warga di Desa Merabu yang berprofesi sebagai petani belum mengoptimalkan potensinya sejak adanya status HD pada tahun 2014. Misalnya jenis tanaman utama masih didominasi oleh sawah, ternak berupa ayam atau itik, dan tanaman sampingan berupa karet atau hortikultura yang hanya mengandalkan bantuan langsung dari TNC dan TFAC, tetapi tidak bersifat teknis.

Kelompok HD Merabu saat ini mengelola pariwisata dengan baik, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum bergabung karena kendala sumber daya manusia, aspek teknis lainnya, dan potensi destinasi yang belum tergali secara maksimal. Merujuk pada hasil FGD tanggal 21 April 2019, kami menemukan beberapa informasi penting telah diperoleh seperti kelompok pengelola pariwisata telah ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa Merabu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kerima Puri terdiri dari 4 bidang yaitu pengamatan kawasan hutan desa, pengembangan dan pemanfaatan desa wisata dan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan bidang sosial (pengembangan pertanian pertanian) dengan anggota 16 orang.



**Gambar 5.** Destinasi Danau Nya'deng  
Sumber: Survei Penulis, 2019



**Gambar 6.** Destinasi Kerima Puri  
Sumber: Survei Penulis, 2019

Beberapa wisata berbasis alam di Desa Merabu adalah Danau Nya'deng (lihat Gambar 5) dan Pohon Adopsi, atau jalur pelacakan untuk mendaki gunung kecil oleh berbagai wisatawan asing dan domestik atau gua sarang burung walet yang saat ini dikelola oleh PT Walesta (perusahaan swasta). Gambar 6 menunjukkan lokasi wisata Puri Kerima Institute yang menyimpan beberapa peninggalan prasejarah seperti kayu dan fosil, souvenir kerajinan tangan, dan hasil penelitian dari TNC berupa road map tempat wisata dan keanekaragaman satwa dilindungi yang diperuntukan bagi pengetahuan publik.

Gua Beloyot seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7, sebagai potensi wisata edukasi yang tidak kalah menarik, antara lain goa sejarah, peninggalan adat suku Dayak Lebo, serta menyuguhkan beberapa lukisan hewan dan telapak tangan manusia purba. Selain itu yang tidak kalah menarik jika anda mengunjungi Doko'an Lemku yang terkenal dengan wisata spot foto (simak Gambar 8) bekerjasama dengan PT UDIT. Terdapat pengembangan peternakan seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya melalui TNC yang dikelola oleh masyarakat sekitar, hingga budidaya beberapa tanaman ramah lingkungan dan rumah penginapan unik khusus untuk wisatawan.





**Gambar 7.** Destinasi Gua Beloyot  
Sumber: Survey Penulis, 2019



**Gambar 8.** Destinasi Doko'an Lemku  
Sumber: Survey Penulis, 2019

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Desa Merabu yang disusun oleh warga, aparat desa, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Berau pada Januari 2018, terdapat potensi ekonomi selain pariwisata dan juga terdapat potensi ekonomi. penyediaan jasa lingkungan dari Danau Nya'deng. Informasi pendukung lainnya adalah potensi tanaman hutan non kayu seperti budidaya madu hutan, gaharu, dan walet yang dikelola oleh PT Utama Damai Indah Timber (UDIT). Desa Merabu juga mengembangkan perdagangan karbon yang menjadi kepentingan umum karena dikategorikan sebagai paru-paru dunia. Sungguh luar biasa jika potensi tersebut dapat dikelola dengan baik dan menjadi sumber pendapatan bagi Desa Merabu jika melibatkan semua elemen.

Ada yang menarik jika melihat perkembangan wisatawan, berdasarkan laporan sementara dari kantor Desa Merabu bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 sekitar 250 orang terdiri dari 200 wisatawan nusantara dan sisanya 50 wisatawan mancanegara dengan berbagai keperluan seperti seperti penelitian, pelacakan, studi banding, outbond, dan hiburan. Dengan potensi dukungan dari alam dirasakan masih sedikit kunjungan wisatawan. Belum lagi pendapatan tunai yang ditampung Kerima Puri belum optimal dan pengelolaan aset pariwisata, misalnya tiket masuk setiap kunjungan wisatawan belum tersedia. Dengan pemberlakuan khusus untuk setiap turis asing sebesar Rp 250.000, rupanya belum berdampak besar, meski ada satu atau dua kunjungan tiap minggu.

Akses infrastruktur jaringan internet, jalan raya, transportasi umum yang tidak memadai dari pusat kota, dan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata (toilet umum, restoran, pemandu wisata, dan area parkir) juga belum disediakan, sehingga menjadi tugas utama pengelola (Kamri *et al.*, 2020).



**Gambar 9.** Pengembangan Proyek PLTS di Merabu  
Sumber: Survei Penulis, 2019

*Multiplier effect* ekonomi belum berdampak signifikan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar karena masih dilakukan secara tradisional. Pemberdayaan yang didukung Kerima Puri masih sangat minim meskipun ada usaha kecil, namun pemiliknya hanya beberapa aparat desa atau yang berkepentingan. Begitu pula dengan penginapan wisata, catering, dan persewaan perahu motor yang belum sepenuhnya sebanding dengan kesejahteraan Desa Merabu. Padahal harga sewa penginapan murah Rp 50.000 - Rp 150.000 per hari, catering yang bervariasi mulai dari Rp 30.000 hingga Rp 75.000 per bungkus, dan sewa perahu motor mencapai Rp 200.000 untuk sekali tour ke Danau Nya'deng dan sebagainya. Dengan begitu, belum cukup untuk memajukan Desa Merabu dari sektor pariwisata.

Selain TNC, kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun oleh American Millenium Challenge Account (MCA) dan PT Akuo Energy dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang disalurkan kepada masyarakat Desa Merabu tahun 2018, secara tidak langsung juga menambah ke objek wisata (perhatikan Gambar 9). Bagaimana tidak, mengingat tidak semua desa di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan Indonesia bisa mendapatkan kesempatan ini. Beberapa wisatawan dapat melihat langsung bagaimana proses pengolahan aliran sumber daya dari matahari menjadi sumber energi yang dapat dinikmati oleh seluruh warga desa. Sebelum adanya PLTS di Desa Merabu, listrik dari PLN hanya dapat digunakan untuk malam hingga dini hari sedangkan tidak ada kegiatan yang berarti mulai dari memasak, menonton televisi hingga proses administrasi perangkat desa. Saat ini warga dapat memanfaatkan listrik dari PLTS secara gratis dan dapat dimanfaatkan secara optimal dari pagi hingga sore hari, sehingga jaringan internet saat itu dapat diakses, terutama untuk menyelesaikan proses administrasi Desa Merabu.

Keanekaragaman dari stud-studi yang tentu relevan tentang sejauh mana upaya pengembangan dan pengelolaan terhadap eko-wisata telah dibahas oleh Suryani *et al.* (2020), Sari dan Rifai (2020), serta Sulaiman *et al.* (2020) dengan tiga objek yang berbeda. Untuk studi kasus di Wisata Alam Hutan Irup (Lombok Barat), keberhasilan pembangunannya perlu dirancang dengan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT). Disisi lain, Kabupaten Demak yang mempunyai corak khas seperti Desa Wisata Hutan Mangrove, dalam tahapan pelaksanaannya, memerlukan pengawasan dan perencanaan menyeluruh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh Wisata Hutan Mangrove yang terletak di Kabupaten Kendal bergantung pada prioritas alternatif strategi yang dipilih, dimana ada kerjasama dengan perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan pengelola setempat untuk menguatkan sumber pendanaan. Ini tidak terlepas dari penambahan fasilitas pendukung di setiap kegiatan, perhatian lebih dari sisi operasional, keterlibatan masyarakat, dan ekspansi terhadap lahan *mangrove*.

## KESIMPULAN

Studi ini berusaha mempelajari sejauh mana keterkaitan berbagai elemen pendukung dalam kemajuan eko-wisata di HD Merabu. Adanya potensi di sektor pariwisata tentu memberi harapan dan sinyal cerah bagi penduduk di Desa Merabu. Terlebih lagi, dominan *stake holders* yang berkaitan dengan perkembangannya mempunyai peran teknis, karena berstatus sebagai petani. Artinya, ada peluang atau jalan terbuka yang signifikan melihat *history* HD Merabu yang sebelumnya memiliki hutan yang masih asri, menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan karena akan berkaitan erat untuk menggerakkan sektor lain seperti pariwisata. Pembangunan wisata yang berdampingan dengan alam, tentu tidak memiliki konsekuensi yang negatif apabila ada transformasi dari sektor lain semisal pertanian dan pemanfaatan jasa ekosistem pada sektor kehutanan itu sendiri. Tak cukup sampai disitu, ini bukan menjadi faktor penghambat kesuksesan untuk perjalanan pariwisata di HD Merabu, melainkan lebih condong kepada kunci utama.

Pemberian status HD kepada masyarakat di Desa Merabu yang umumnya berprofesi sebagai petani, dapat memberikan kepastian pengelolaan hutan, terutama dalam hal hak pengelolaan atas lahan yang digarap (persil). Kepastian hak pengelolaan ini secara ekonomis memberikan nilai tambah bagi aset yang mendapat regulasi dalam HD, terutama aset tanah, ladang pertanian, perkebunan, dan termasuk destinasi wisata yang berkembang. Kepastian kepemilikan aset tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat berproduksi tanpa khawatir apa yang dilakukannya berpotensi melanggar hukum.

Terkait permasalahan yang menjadi esensial dalam pengelolaan HD untuk mengembangkan ekowisata, terkendala oleh pendanaan operasional. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan hal-hal yang tidak kalah pentingnya yaitu pendampingan rutin, akses pasar, transportasi, jaringan infrastruktur yang memadai, kualitas SDM, dan partisipasi masyarakat Desa Merabu yang belum optimal, sehingga harus mengacu pada prioritas desa yang merupakan bagian dari skala Indonesia agar dapat dilaksanakan secara terintegrasi untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

Kendala penelitian terletak pada keterbatasan jumlah sampel, waktu wawancara, dan aspek lokasi yang jauh dari pusat kota. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya terkait objek penelitian ini, faktor-faktor tersebut dapat dipertimbangkan agar temuannya lebih variatif dan kompleks untuk disajikan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami patut mengapresiasi setinggi-tingginya kepada aparat Desa Merabu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu dalam survei ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Berau. (2021). Road Show Musrenbang, Terakhir di Kecamatan Kelay Usulan Sarana Telekomunikasi, Listrik, Air Bersih, dan Pengaspalan Jalan Kampung Jadi Prioritas. Diakses pada 7 Mei 2021 melalui <https://beraukab.go.id/v2/?p=12192>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2019). *Kecamatan Kelay dalam Angka 2019*. Dikases pada 15 Desember 2020 melalui <https://beraukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/c2c0eb5ff79e8f30d5cada41/kecamatan-kelay-dalam-angka-2019.html>
- Connell, J., Page, S. J., & Bentley, T. (2009). Towards sustainable tourism planning in New Zealand: Monitoring local government planning under the Resource Management Act. *Tourism Management, 30*, 867–877.
- Darma, D. C., Maria, S., Kasuma, J., & Lestari, D. (2020). Factors involved in the number of tourist visits in the Muara Badak, Indonesia. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 5*(24), 142-151.
- Darma, S., Maria, S., Lestari, D., & Darma, D. C. (2020). An Agroforestry Consortium: A Multiderminant in Instituting an Agrisilviculture System to Improve Welfare. *Virtual Economics, 3*(1), 95-111.
- Ikhtiangung, G. N., & Utami, S. W. (2020). Green tourism marketing untuk pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di kawasan wisata Hutan Payau Cilacap. *Jurnal Pariwisata Pesona, 5*(1), 55-63.
- Ilmi, Z., Darma, D. C., & Wijayanti, T. C. (2020). Can servqual mediate from the store atmosphere and customer satisfaction?. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42*(3), 359-368.
- Junaid, I., Mansyur, M., & Ulang, A. (2020). Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Jurnal Pariwisata Terapan, 3*(2), 110-123.
- Kamri, T., Kasuma, J., Kutok, J., & Darma, D. C. (2020). Do Tourists Willing to Pay for the Value of Environmental Conservation? A Case of Annah Rais Longhouse and Hot Springs. *Journal of Tourism Management Research, 7*(2), 218-228.
- Kasuma, J., Razak, F. L., Omar, N., Naim, A. S., Naimullah, B. S., & Darma, D. C. (2020). Attitude, Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use towards Intention to Use M-Commerce: A

- Case of Grocery Shoppers in Kuching, Sarawak. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 8(1), 71-84.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau Barat. (2019). *Profil Hutan Kalimantan Timur*. Diakses pada 29 Januari 2021 melalui <https://dishut.kaltimprov.go.id/hal-profil-hutan-kaltim.html>
- Lincu, A. (2019). Tourism Development in Yuantong Ancient Town. *Analele Universităţii din Oradea, Seria Geografie*, 29(2), 194-211.
- Mujiono, D. I. (2018). Potensi bahari Pulau Derawan menuju destinasi wisata kompetitif. *Dinamika Global*, 3(2), 55-87.
- Oley, F. (2020). *Hutan Desa di Merabu*. Diakses pada 05 Januari 2021 melalui <https://www.merabu.desa.id/hutan-desadi-kampung-merabu/>
- Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). A Brief Introduction to Qualitative Research. *Canadian Journal of Medical Radiation Technology*, 37(1), 16-19.
- Public Relations of East Kalimantan Province (2015). *Pemanfaatan Hutan Desa Harus Sesuai dengan Aturan* Diakses pada 23 Oktober 2020 melalui <https://kaltimprov.go.id/berita/pemanfaatan-hutan-desaharus-sesuai-atura>
- Pulungan, M. S. (2013). Optimalisasi Pengembangan Potensi Eko-wisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(3), 205-214.
- Ratnasari, S. L., Susanti, E. N., Ismanto, W., Tanjung, R., Darma, D. C., & Sutjahjo, G. (2020). An Experience of Tourism Development: How is the Strategy?. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 11(7), 1877-1886.
- Roy, J., Kuncoro, M., & Darma, D. C. (2019). Kajian Dampak Ekonomi Hutan Desa Terhadap Pendapatan Petani Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur). *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 197-216.
- Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. *Annals of Tourism Research*, 33(4), 1121-1140.
- Sari, S. P., & Rifai, A. (2020). Pengelolaan Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 121-138.
- Suharto, R. B., Roy, J., & Darma, D. C. (2019). Degree of potential and development strategy of tourism objects. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 2343-2347.
- Sulaiman, M., Sulardiono, B., & Ain, C. (2019). Strategi pengembangan wisata hutan mangrove berbasis kegiatan konservasi di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal. *Journal of Maquares*, 8(2), 46-55.
- Suryani, E., Furkan, L. M., & Diswandi, D. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Alam Hutan Irup Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. *Jurnal PEPADU*, 1(1), 64-73.
- Tanguay, G. A., Rajaonson, J., & Therrien, M.-C. (2013). Sustainable tourism indicators: Selection criteria for policy implementation and scientific recognition. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(6), 862-879.
- Wahyuni, T., Diana, R., Makinuddin, N., & Nouval, B. (2018). Inisiatif-inisiatif program yang dikembangkan dalam upaya implementasi REDD+ di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 145-160.

Wahyuningsih, D., Sriwardani, S., Kasuma, J., Nuraliati, A., & Darma, D. C. (2020). Application of Market Innovation Strategies for Banjaran Coffee Products using the Walk Shop. *International Journal of Entrepreneurial Research*, 3(2), 49-53.